

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal: Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Sumatera Selatan

Ika Setia Ningsih, Maulan Irwadi, Lukita Tri Permata

^{1), 2)} Program Stud Ekonomii, Universitas Indo Global Mandiri

³⁾ Jl. Jendral Sudirman No 629 KM 3,5 Palembang Kode Pos. 30129

Email: ikasetia76@gmail.com ¹⁾, irwadi1@yahoo.co.id ²⁾, lukita@uigm.ac.id ³⁾

Article Information:

Received: Oct 01, 2023, Accepted: Oct 08, 2023, Published: Nov 1, 2023

Abstract

This study aims to determine the effect of Local Own Revenue, General Allocation Funds and Regional Government Financial Performance on Capital Expenditures in districts and cities in the South Sumatra region. The object of this research is the district and city governments in the South Sumatra region, totaling 17 local governments and the research years from 2015 to 2019. The data used are secondary data and the research sample is a saturated sample because all research objects are sampled. The analysis technique uses multiple regression and the data is processed using SPSS software. The results showed that based on the simultaneous test, the variables of Regional Original Income, General Allocation Funds and Regional Government Financial Performance had a significant effect on capital expenditure. Based on the partial test, the variables of Regional Own-Owned Income and Regional Government Financial Performance as measured by the Level of Regional Wealth have a significant effect on Capital Expenditures while the General Allocation Fund variable has no significant effect on Capital Expenditures.

Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Fund, Regional Government Financial Performance and Capital Expenditure

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat menggunakan dana daerah dengan efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

Pendapatan Daerah menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatannya, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda dalam membiayai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber pada APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya (Karyadi, 2017)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah PAD, Dana Alokasi Umum dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan?
2. Apakah PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan?
4. Apakah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Selatan?

2. Tinjauan Literatur

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi dalam (Juniawan & Suryantini, 2018) semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan.

2.2 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 dalam (Juniawan & Suryantini, 2018) menjelaskan bahwa DAU merupakan danayang didapatkan melalui penerimaan dalam negeri diberikan dari pusat kepadadengan harapan keadilan finansialantar daerah yang digunakan membiayai keperluan belanjauntuk menyelenggarakan desentralisasi. Kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan terutamanya dalam desentralisasi fiskal, dengan adanya permasalahan ini, pemerintah pusat membuat kebijakan transfer dari pusat untuk daerah.

2.3 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan menurut (Andriyani & Diah, 2020)adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan suatu organisasi sangat penting untuk diukur. Analisis pengukuran kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

2.4 Belanja Modal

Belanja modal menurut Nuri dkk (2020: 136) merupakan bagian dari belanja langsung pemerintah. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakandalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

3. Metode Penelitian

3.1 Data dan Tehnik Pengumpulan Data

3.1.1 Jenis data

Menurut (Sugiyono, 2015) data yang digunakan untuk penelitian adalah:

a. Data Primer

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber ahli berupa opini orang secara individu atau kelompok, kejadian atau kegiatan hasil.

b. Data Sekunder

Adalah data sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh laporan tahunan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten dan kota (Dispenda) di Wilayah Sumatera lalu diolah kembali oleh peneliti.

3.1.2 Tehnik Pengumpulan data

Untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi peneliti mengumpulkan data dengan beberapa tehnik pengumpulan data yaitu :

1. Penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan, yaitu penelitian dengan menggunakan beberapa teknik yaitu:
 - a) Observasi atau pengamatan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau secara langsung kejadian yang terjadi dilapangan.
 - b) Dokumentasi, yaitu data tertulis yang dikeluarkan oleh instansi terkait, dalam hal dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dapat juga didefinisikan sebagai keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten dalam wilayah Sumatera Selatan.

Menurut (Sugiyono, 2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan harus bersifat representatif (mewakili). Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh disebut juga dengan istilah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sehingga dalam penelitian ini yang dijadikan sampel adalah 17 (tujuh belas) pemerintah daerah kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di atas.

4. Hasil Dan Diskusi

4.1 Uji Hipotesis

Hipotesis penelitian yang perlu diuji adalah perputaran kas dan piutang terhadap profitabilitas ($F_{tabel} = F_{[k; n-k]}$). Jika nilai $sig < 0,05$, atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika nilai $sig > 0,05$, atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.

Tabel 4.1. Uji Simultan (F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1921379980875 747500000000,000	3	6404599936252 49200000000,000	31,810	,000 ^b
Residual	1630838861927 710300000000,000	81	2013381311021 8645000000,000		
Total	3552218842803 457700000000,000	84			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), TKD, DAU, PAD

Berdasarkan tabel di atas, dengan taraf signifikan $0,000 < 0,005$, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU dan tingkat kekayaan daerah terhadap Belanja

Model secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 4.2. Uji Parsial (t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	433854673387,885	49063543285,275		8,843	,000
1 PAD	1,214	,155	1,223	7,832	,000
DAU	-,128	,081	-,164	-1,572	,120
TKD	1703301254984,966	419971145561,292	-,542	-4,056	,000

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel di atas maka :

- Variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dari tabel di atas didapat nilai sig $0,000 < 0,05$. Secara statistik variabel ini berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal dengan demikian Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan H_2 diterima.
- Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari tabel di atas didapat nilai sig $0,120 > 0,05$. Secara statistik variabel ini berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal dengan demikian Dana Alokasi Umum berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan H_3 ditolak.
- Variabel tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dari tabel di atas didapat nilai sig $0,000 < 0,05$. Secara statistik variabel ini berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dengan demikian tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Maka dapat disimpulkan H_4 diterima.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada Tabel model summary dan tertulis R square. Pengujian dengan menggunakan koefisien determinasi adalah membandingkan nilai *R square* untuk variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 4.3. Uji R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,735 ^a	,541	,524	141893668323,21533	1,952

a. Predictors: (Constant), TKD, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R square* yang dihasilkan adalah sebesar 0.524 yang berarti persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU dan tingkat kekayaan daerah terhadap Belanja Modal sebesar 52,40%, sedangkan sisanya 47,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4.2 Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Tingkat Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian SPSS diperoleh nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU dan tingkat kekayaan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditentukan oleh kemampuan daerah dalam membelanjakan anggaran belanja modal yang diperoleh dari pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah kota dan kabupaten. Menurut teori Agensi terdapat dua kepentingan yaitu agen dan principal. Agen dalam hal ini pemerintah daerah mengelola dana prinsipal atau pemilik dalam hal ini dana yang bersumber dari PAD, Dana Alokasi Umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal salah satunya dengan membangun atau membeli untuk fasilitas publik. Berdasarkan data hasil penelitian di atas diketahui bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan tingkat kekayaan daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya dan memperoleh nilai kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mampu untuk membelanjakan belanja modalnya dengan didukung dana dari PAD, Dana Alokasi Umum dan disuport dengan kinerja pemerintah daerah yang baik.

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian SPSS didapat nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut teori Mahmudi dalam Ari dan Santi (2018:1263) semakin tinggi kemampuan daerah dalam mendapatkan dan menggali Pendapatan Asli Daerahnya, maka semakin tinggi pengeluaran daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya yang selaras dengan keinginan, keperluan dan pembangunan. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang benar-benar diperoleh dan digali dari potensi pendapatan yang ada di suatu daerah berdasarkan peraturan daerah dan Undang-Undang yang berlaku di mana Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 18, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data hasil penelitian PAD di wilayah Sumatera Selatan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa setiap tahunnya PAD mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya Kota Palembang, Kabupaten MUBA dan Kabupaten Banyuasin. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengeluarannya termasuk Belanja Modal. Sehingga PAD mendukung pemerintah dalam mempersiapkan dana dan kemampuan daerah untuk membelanjakan Belanja Modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian SPSS didapat nilai $\text{sig } 0,120 > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU merupakan dana yang didapatkan melalui penerimaan dalam negeri diberikan dari pusat ke pemda dengan harapan keadilan finansial antar daerah yang digunakan membiayai keperluan belanja untuk menyelenggarakan desentralisasi. Kemampuan keuangan setiap daerah berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan terutamanya dalam desentralisasi fiskal, dengan adanya permasalahan ini, pemerintah pusat membuat kebijakan transfer dari pusat untuk daerah. Menurut teori DAU (Karyadi, 2017) merupakan transfer yang bersifat *Block Grant* artinya penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan Imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian di atas pada tabel 4.2 dapat diketahui DAU untuk kabupaten/ kota di wilayah Sumatera Selatan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk DAU terbesar yaitu pada Kota Palembang dan DAU terkecil pada Kabupaten Penukal Abab. Akan tetapi peruntukan dana alokasi umum lebih banyak alokasinya untuk belanja pegawai sehingga untuk belanja modal tidak menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah sehingga tidak menjadi sumber dana khusus dalam belanja modal. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal tetapi tidak signifikan bahkan untuk pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan berpengaruh negatif.

4. Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Tingkat Kekayaan Daerah) terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian SPSS didapat nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu kinerja keuangan Pemda yang diukur dengan tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Menurut teori baik tidaknya kinerja keuangan daerah menurut Deni dan Henny (2018: 4718) dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan. Baik tidaknya kinerja keuangan daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis rasio keuangan. Indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan dapat diukur dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio tingkat kekayaan daerah (TKD), rasio efisiensi keuangan

daerah, rasio tingkat pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan kontribusi BUMD. Pada penelitian ini variabel tingkat kekayaan daerah diukur yaitu menggunakan PAD dibandingkan dengan total pendapatan sebagai proksi pengukuran tingkat kekayaan daerah. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3 dapat dilihat kemampuan atau tingkat kekayaan daerah. Semakin tinggi kekayaan daerah makin mendukung daerah untuk memiliki asset-aset yang dimiliki dan ini mendukung pemerintah daerah untuk membelanjakan modalnya. Hal ini mendukung hasil penelitian bahwa Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara simultan diperoleh nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu PAD, DAU dan tingkat kekayaan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
2. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial untuk variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal hasil pengujian didapat nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal hasil pengujian didapat nilai $\text{sig } 0,120 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Hasil pengujian secara parsial untuk variabel kinerja keuangan Pemda yang diukur dengan tingkat kekayaan daerah didapat nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.
5. Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) nilai *Adjusted R square* yang dihasilkan adalah sebesar 0.524 yang berarti persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu PAD, DAU dan tingkat kekayaan daerah terhadap Belanja Modal sebesar 52,40%, sedangkan sisanya 47,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Referensi

- Andriyani, N., & Diah, E. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014–2018). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(2), 132–144.
- BI.go.id. (2020). (www.bi.go.id, 2020).
- Cnnindonesia. (2017). www.cnnindonesia.com.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Journal Manajemen Unud*, 7(9), 4713–4746.
- Indonesia, P. R. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 55 tahun 2005 tentang*

Dana Perimbangan. Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Indonesia, R. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jakarta: Diper-Banyak Oleh Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia*.

Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3).

Karyadi, S. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014. *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*.

Masdiyanti, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, intergovernmental revenue, temuan dan opini audit BPK pada kinerja keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1150–1182.

Negara, I. K. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Dividen Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Agency Cost Sebagai Variabel Intervening Pada Emiten Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen*, 19(1), 49–66.

Nomor, P. M. D. N. (n.d.). 59, Tahun 2007 tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 2007. *Depdagri RI*.

Pasal, I. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Menteri Dalam Negeri*.

Resmi, S. (2017). Perpajakan teori & kasus. *Jagakarsa, Jakarta Selatan: Salemba Empat*.

Sanjaya, H. (2016). *Ghozali, I.(2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VIII). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Sugiyono, P. (2015). Metode penelitian kombinasi (mixed methods). *Bandung: Alfabeta*.

Wulandari, R., & Risal, E. K. (2020). Sosialisasi Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RJABM (Research Journal of Accounting and Business Management)*, 4(2), 97–115.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)